

PERKEMBANGAN PESANTREN DI TENGAH DINAMIKA KONFLIK DAN MARAKNYA RADIKALISME PADA KABUPATEN POSO

Ubaidillah Canu

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Jl. Lumba-Lumba No.RT 001/03, Dufa
Dufa, Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 9772

Email: ubaidtjanu@gmail.com

Zainab Canu

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Jl. Lumba-Lumba No.RT 001/03, Dufa
Dufa, Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 9772

Email: zaenabcanu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe, analyze and interpret the phenomenon of the development of Islamic boarding schools that grow and develop in the midst of the dynamics of conflict that is still happening today, where on the other hand the development of Islamic boarding schools is also marked by the rise of radicalism movements marked by the emergence of armed civilian groups. which was later called the East Indonesia Mujahidin (MIT), this study also aims to explain the alleged relationship between pesantren and radicalism, pesantren with MIT and the allegation of pesantren as a fabrication of radicalism. The method in this study uses a qualitative approach to the type of case study (case study) which emphasizes the ability of the researcher as a key research instrument. The research findings at least explain several things, namely; 1) the development of the pesantren that occurred in Poso began after the conflict of faith where one of the incidents in the conflict was the massacre that occurred at the Walisongo Islamic boarding school in Kilo Sembilan, 2) the radicalism that developed in Poso did not coincide with the motivation for the development of the pesantren, 3) the developing pesantren Poso has no relationship with the MIT group, 4) MIT is purely a combatant group that grows from social ties outside Islamic boarding school education, 5) MIT combatant actors in the investigations conducted by researchers do not come from the pesantren educational environment in Poso, moreover pesantren in Poso is a typology of traditional pesantren which is still said to be very young and not yet established and does not yet have a broad network of regeneration, so it is impossible to become a fabricator of Poso combatants.

Keywords: *Islamic boarding schools; conflict; radicalism*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan fenomena perkembangan pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah dinamika konflik yang masih terus terjadi hingga saat ini, di mana pada sisi yang lain perkembangan pesantren juga turut diwarnai dengan maraknya gerakan radikalisme yang ditandai dengan munculnya kelompok sipil bersenjata yang belakangan disebut Mujahidin Indonesia Timur (MIT), penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dugaan hubungan pesantren dengan radikalisme, pesantren dengan MIT dan dugaan pesantren sebagai pabrikasi radikalisme. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus (*case study*) yang menekankan pada kemampuan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian. Temuan penelitian setidaknya menjelaskan beberapa hal yaitu; 1) perkembangan pesantren yang terjadi di Poso dimulai paska konflik iman di mana salah satu insiden dalam konflik tersebut adalah pembantaian yang terjadi di pesantren Walisongo di Kilo Sembilan, 2) radikalisme yang berkembang di Poso tidak beriringan dengan motivasi perkembangan pesantren, 3) pesantren yang berkembang di Poso tidak memiliki hubungan dengan kelompok MIT, 4) MIT murni merupakan kelompok kombatan yang tumbuh dari ikatan sosial di luar pendidikan Islam pesantren, 5) aktor-aktor kombatan MIT dalam investigasi yang peneliti lakukan tidak berasal dari lingkungan pendidikan pesantren di Poso, lagipula pesantren di Poso merupakan tipologi pesantren tradisional yang masih dikatakan sangat belia dan belum mapan serta belum memiliki jaringan kaderisasi yang luas, sehingga sangat mustahil untuk dapat menjadi pabrikasi kombatan Poso.

Kata Kunci: Pesantren; Konflik; Radikalisme

PENDAHULUAN

Perkembangan pesantren di Poso setidaknya menunjukkan progresnya setelah berakhirnya periode konflik iman (1998-2001) yang ditempuh melalui rekonsiliasi Malino yang diinisiasi Jusuf Kalla sebagai wakil presiden saat itu. Pesantren yang berkembang di Poso ditilik dari karakteristiknya adalah bentuk pendidikan tradisional yang sejarahnya sebetulnya telah mengakar secara berabad-abad dalam bentangan historisitas bangsa ini (Ziemek, 1986). Pesantren yang berkembang di Poso setidaknya mengandung makna keislaman sekaligus semangat keaslian (*indigenous*) Indonesia (Dhofier, 2011). Atas semangat itulah pesantren di Poso dibangun paska konflik dengan tujuan untuk menggairahkan nilai-nilai keislaman yang dilembagakan melalui pendekatan sistem pendidikan pesantren sebagai upaya untuk merekonstruksi dan merehabilitasi anak-anak korban konflik.

Konflik yang terjadi saat itu setidaknya telah merampas banyak hal yang ada di Poso. Setidaknya kerukunan antar umat beragama yang telah disemai dalam kurun waktu yang begitu lama, dirusak oleh arogansi iman antar masing-masing pihak yang saling bunuh atas nama keyakinan. Akibatnya, banyak sekali masyarakat yang sebetulnya tidak terlibat konflik tapi turut merasakan dampaknya dan memaksa mereka untuk turut mengungsi keluar Poso. Yang tersisa di Poso adalah kombatan dari kedua belah pihak yang bertikai, saling bunuh dan saling membunuh hanguskan pemukiman dan tempat-tempat ibadah.

Atas gambaran konflik itu seiring dengan menguatnya isu radikalisme di tanah air maka, perbincangan pesantren dalam konteks Poso sangat patut untuk turut diuraikan dalam penelitian ini, mengingat eksistensi pesantren dalam dua dasawarsa telah menjadi isu global yang dikaji dan dianalisis oleh pengamat dunia sebagai salah satu isu penting yang kerap kali dipandang sebagai pabrikasi radikalisme. Hal ini sangat beralasan karena indikasi kuat dan bisa dibuktikan menunjukkan kelompok sosial yang terpapar radikalisme dan menjadi aktor terorisme, tidak sedikit yang berasal dari bentukan intelektualisme pesantren.

Dilihat dari perkembangannya, pesantren di Poso setidaknya menunjukkan progres yang baik dengan lahirnya berbagai pesantren dengan corak, warna, karakteristik serta ideologi yang diusung masing-masing. Perkecambahan pesantren di sana umumnya terjadi pada basis-basis umat Islam yang tampil dengan pernak-pernik pemikiran islamnya yang beragam. Hal ini menjadi keniscayaan mengingat perkembangan dunia Islam turut diwarnai pula dengan perkembangan pemikirannya.

Di tengah progres perkecambahan pesantren yang mewabah tersebut, namun pada sisi yang lain, terjadi skeptisisme publik terkait dengan perkembangannya. Skeptisisme publik ini muncul disebabkan konteks sosial Poso yang masih terus bergulat dalam dinamika konflik yang tidak kunjung selesai. Maka dari itu, sebagai lembaga pendidikan Islam yang tampil dengan ajaran islamnya, sering kali publik melihat pesantren dengan pandangan curiga. Hal ini

tidak lepas dari narasi-narasi liar yang muncul mengkait-kaitkan radikalisme dengan pesantren.

Kecurigaan ini memang pada kenyataannya sangat bisa dimaklumi mengingat aktor radikalisme di tanah air pada umumnya memiliki keterikatan intelektual dengan sistem pendidikan pesantren. Seperti diketahui banyak peristiwa kekerasan, terutama yang terjadi dalam tragedi bom Bali misalnya, telah menjadikan pesantren sebagai kambing hitam, sehingga muncul klaim bahwa pendidikan pesantren berusaha mencetak agen terorisme. Sebagaimana yang terpotret pula dalam konteks Poso, eksistensi pesantren menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkecambahannya terjadi di tengah massifnya penetrasi radikalisme yang diusung MIT dan masih menguatnya narasi konflik. Keberadaannya pun melonjak seiring dengan perubahan orientasi umat Islam yang turut menuntut adanya penguatan di sektor iman dan pendidikan Islam. Perkembangan pesantren selanjutnya menjadi potret konstruksi sosial sekaligus konstruksi intelektualisme Islam yang ikut mewarnai kehidupan sosial dan pendidikan pada masyarakat yang semula mengalami pembelahan sosial akibat konflik iman di masa lalu.

Belum lagi sengkabut konflik sosial yang sebetulnya lebih banyak bergerak dalam tendensi politik sehingga menjadi variabel yang paling kental mempengaruhi proses gesekan sosial yang menyebabkan konflik iman berskala besar di Poso. Di satu sisi, kedua pihak dari komunitas iman masing-masing belakangan sudah terlanjur saling menaruh dendam dan curiga sehingga memaksa terjadinya disharmoni sosial dan pembelahan sosial berskala besar yang mengakibatkan munculnya intoleransi berbasis iman.

Intoleransi inilah yang kemudian melonjak menjadi sebuah pelabelan sosial terhadap umat Islam Poso akibat dengan munculnya MIT sebagai gerakan sosial lokal yang lantang mengkampanyekan tentang ide islam politiknya meliputi penerapan syariah dan pembentukan negara Islam khilafah. Akibatnya pandangan publik turut membenarkan tentang narasi intoleransi yang lahir dari ikatan intelektualisme pesantren. Padahal pernyataan ini tidak dapat digeneralisir dalam konteks muslim Poso, karena tidak secara keseluruhan komunitas muslim di sana mengamini gerakan MIT.

Narasi-narasi tentang radikalisme dan pesantren turut dikonfirmasi oleh BNPT dengan merilis beberapa pesantren yang diduga memiliki kaitan erat dengan radikalisme. Data yang dikeluarkan oleh BNPT mencatat sedikitnya terdapat beberapa pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia yang terindikasi paham radikalisme. Pesantren tersebut diantaranya adalah pesantren Amanah Poso yang menjadi salah satu objek pengamatan dalam kajian ini (*BNPT: 19 Pesantren Terindikasi Ajarkan Radikalisme*, n.d.).

Setidaknya gambaran umum tentang potret sosial di atas yang terjadi di Poso menyimpan argumentasinya sendiri yang perlu diungkap dalam penelitian ini. Konteks perkembangan pesantren yang terjadi di Poso jelas merupakan fenomena

unik yang bergerak dalam dinamika konflik yang masih berlangsung ditambah dengan massifnya narasi radikalisme yang diusung MIT. Sangat jauh berbeda dengan konteks sosial tentang isu-isu radikalisme di tempat lain yang tidak mengalami keretakan sosial yang parah sebagaimana yang terjadi di Poso.

Adapun *state of the art* dalam penelitian ini terletak pada kebaharuan analisis tentang perkembangan pesantren yang tumbuh pesat di tengah krisis sosial yang terjadi akibat konflik yang masih berlangsung yang menyebabkan terjadinya pembelahan masyarakat antar komunitas iman. Tidak sampai disitu saja krisis sosial yang terjadi di sana juga diperparah dengan munculnya MIT sebagai argumen tersendiri yang turut berkembang dengan motivasinya.

Hal demikian tentunya mendorong rasa ingin tahu peneliti untuk mengungkap keterlibatan pesantren dengan MIT. Apalagi gambaran pesatnya pertumbuhan pesantren di Poso mengundang curiga sebagai salah satu fenomena yang tidak berbanding lurus dengan kondisi sosial yang ada saat ini. Normatifnya pertumbuhan pesantren yang berada di daerah yang terpapar radikalisme dan mengalami konflik seharusnya cenderung lebih lambat, belum lagi Poso sendiri merupakan daerah yang tidak strategis untuk kawasan komersial pendidikan.

Dari konteks demikian menjadi penting untuk dikaji lebih dalam tentang posisi pesantren di tengah dinamika konflik dan radikalisme Islam yang masih terus berlanjut sejauh ini. Setidaknya penelitian ini berupaya untuk menangkap pesan-pesan dibalik fenomena yang tidak terungkap di Poso. Konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas sangat menggelitik untuk turut dijawab atas konflik iman yang telah berlangsung selama 22 tahun dan terasa seperti tidak berujung hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menekankan pada pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Jenis penelitian ini peneliti gunakan untuk memahami gejala-gejala sosial yang diamati mencakup perilaku, peristiwa, sejarah, kasus dan lain sebagainya. Penelitian ini terdiri atas tiga elemen meliputi tempat, pelaku, dan tindakan atau interaksi. Data diperoleh melalui observasi langsung, investigasi mandiri dan wawancara tertutup dengan beberapa pihak yang menolak membuka identitasnya kepada peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme Agama

Radikalisme agama pada awalnya tidak selalu muncul dari paham keagamaan tetapi lebih banyak muncul dari akibat perbedaan pandangan atau bahkan pertikaian politik. Baru kemudian menembus kepada paham keagamaan, dan selanjutnya agama dijadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan agar mendapatkan dukungan, dan motivasi perjuangan.

Awal mula munculnya gerakan radikal dalam sejarah Islam adalah berawal dari adanya pemikiran ekstrem terhadap ajaran Islam sehingga melahirkan berbagai macam *firqoh* (Nasution, 1985). Setidaknya ada beberapa faktor yang paling relevan untuk menjelaskan munculnya radikalisme dalam Islam, yaitu; 1) tendensi politik, timbul akibat gesekan politik yang semula terjadi di kalangan sahabat paska Nabi SAW dan bukan pertama kali timbul dalam bidang teologi. Tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi, 2) faktor emosi keagamaan, 3) faktor kultural, ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme, 4) faktor ideologis anti westernisme, dan 5) faktor kebijakan pemerintah. (Fitriani, 2015)

Pertama, faktor sosial-politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama kaum radikal mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. Tentu saja hal yang demikian ini tidak selamanya dapat disebut memanipulasi agama karena sebagian perilakunya berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Karena dilihatnya terjadi banyak penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim maka terjadilah gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen dan emosi keagamaan.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk didalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif. (Abu Zaid, 2003)

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme, yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya muslim. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal manusia. Bai kelompok radikal, Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat, dengan sekularismenya, sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Keempat, faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam. Sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam (Nuh, 2010). Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problema sosial yang dihadapi umat. (Susanto, 2007)

Disamping itu, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian ekstrim yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas muslim. (Bahri, 2004)

Radikalisme agama juga berhubungan dengan dorongan memperjuangkan keyakinan/paham keagamaan secara drastis, tanpa kompromi, bahkan dengan kekerasan. Pengikut radikalisme keagamaan pada umumnya berasal dari; a) keluarga miskin yang mengalami kekecewaan karena merasa terpinggirkan dalam peran sosial-ekonomi dan politik; b) mereka yang memahami ajaran agama secara tekstual, tidak memahami konteks di mana sebuah teks keagamaan (al Quran dan hadits) itu turun; c) motto gerakannya adalah: pemurnian ajaran agama dalam ibadah dan budaya dan khilafah, dalam bidang politik. (Madjid, 2010)

Lahirnya gerakan radikalisme agama di Indonesia, dalam tinjauan sejarahnya memiliki hubungan erat dengan perkembangan gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah (Laisa, 2014). Selanjutnya, pada abad 12 Hijriah, pemikiran Salafiyah ini dikembangkukuhkan oleh gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1787). Tujuan dari gerakan Wahabi ini juga ingin memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan Salafiyah tidak hanya menyentuh dimensi purifikasi kredo dan ritual, namun juga mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik. (Susanto, 2007)

Kalau kita runut gambarannya dalam konteks moderen akan tampak secara berurutan dimulai pada awal abad ke-20 ditandai dengan letupan islamisme, format bangsa dan negara modern menggantikan sistem kekhalifahan, keamiran dan bentuk negara feodal yang berbasis kekeluargaan atau kesukuan. Penerapan sistem

moderen ini dirasa menggeser dominasi mereka sebagai kaum status-quo. Berdirinya Ikhwan al-Muslimûn di Mesir oleh Hasan al-Banna' (1906-1949) tahun 1930 diikuti dengan berdirinya partai Jamâ'ah Islâmiyah oleh Abû A'lâ al-Mawdudî (1903-1978). Melalui partai dan gerakan ini, al-Mawdudî ataupun Hasan al-Banna memperkenalkan gerakan pemikiran yang berusaha mendefinisikan Islam sebagai ideologi politik berhadapan dengan ideologi politik besar lainnya. Gagasan mereka berkembang dan menggelinding jauh ke negara-negara lain, meski seiring perubahan waktu dan konteks terdapat penyesuaian serta modifikasi.

Tampaknya, dua ideolog ini melegitimasi visi baru kelompok ini dengan merujuk pada seruan Salafisme, suatu bentuk purifikasi yang telah dijalankan oleh Wahabi dan modernisme yang digagas oleh Jamâluddîn al-Afghani (1838-1898), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Muhammad Rasyid Rida (1865-1935). Al-Afghanî fokus pada tema kembali kepada teks-teks Alquran dan hadis, sedangkan Abduh menyatakan bahwa rasionalitas dan kemajuan ilmu pengetahuan modern Barat adalah bagian dari Islam yang murni. Gagasan para pembaharu ini berembus kuat di tengah tekanan gelombang kolonialisasi, yang kemudian melahirkan sentimen anti- dominasi Barat.

Ikhwan al-Muslimîn dan Jama'ah Islamiyyah cenderung melihat bahwa kemunduran umat Islam banyak disebabkan akibat melemahnya solidaritas dan persaudaraan, dibarengi hilangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dan keagamaan. Bagi mereka, mengambil dan merebut kontrol negara akan melapangkan jalan bagi penyebaran Islam. Dari sinilah muncul gerakan radikalisme di dunia Islam yang sarat nuansa politik *power struggle*, yang dalam banyak hal merupakan proses politik yang dikemas dengan simbol-simbol dan wacana keagamaan.

Perkembangan Pesantren di Poso

Pesatnya perkembangan pesantren di Kabupaten Poso menunjukkan signifikansinya setelah tragedi berdarah menyulut konflik atas nama iman pada tahun 1998 hingga 2001 (Hasrullah, 2011; Karnavian, 2008). Berdasarkan data yang dirilis PDPP Kementerian Agama tahun 2020, setidaknya terdapat sembilan pesantren yang tersebar di berbagai tempat di kabupaten Poso. Adapun ke sembilan pesantren itu adalah Pesantren Ittihadul Ummah Gontor Putri enam yang dipimpin KH. Abdul Fattah, S.Th.I, Pesantren Ittihadul Ummah Gontor Putra 13 yang dipimpin KH. Cecep Sobar Rochmat, M.Pd.I, Pesantren Nurul Muhsinin yang dipimpin KH. Muh. Arief, Pesantren Wihdatul Ummah yang dipimpin KH. Busman Muhammad, Pesantren Hidayatullah yang dipimpin Ismail Ali, S.Pd.I, Pesantren Amanah Putri yang dipimpin KH. Ridwan Abdul Karim, Pesantren Amanah Putra yang dipimpin KH. Muhammad Anshari Lc, dan Pesantren Walisongo Poso yang dipimpin Ustad Siraj Ardiansyah. (*Pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id*, 2011)

Jauh sebelum konflik meletus, di Poso hanya dikenal pesantren Walisongo dan jaringan Madrasah Alkhairaat yang pada saat itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah menerapkan sistem pembelajaran kitab-kitab klasik atau yang kerab disebut kitab kuning (*kutub al-turats*). Adapun pembelajaran kitab

kuning sendiri merupakan ciri khas dan identitas intelektualisme Islam klasik yang sampai hari ini masih dilestarikan di kedua lembaga tersebut.

Kedua lembaga ini baik pesantren Walisongo Poso maupun jaringan lembaga pendidikan Alkhairaat merupakan arkeologi keilmuan Islam yang telah lama berkembang di sana. Adapun corak pemikiran pesantren Walisongo sendiri banyak dipengaruhi oleh konsep pemurnian (*al-tanzih*) ala Muhammadiyah sedangkan jaringan lembaga pendidikan Islam Alkhairaat lebih berkarakter tradisionalis-modernis dengan menekankan pada modernisasi pendidikannya. Disebut tradisionalis karena pendidikan Alkhairaat masih mempertahankan sistem pendidikan klasik yang kental dengan kitab-kitab kuning dan metode halaqoh yang sering ditemukan dalam pesantren salaf, adapun disebut modernis karena Alkhairaat juga membuka diri terhadap modernisme dan melakukan modernisasi pendidikan melalui pendekatan kelembagaan dan kurikulum yang bersifat kolaboratif yaitu penerapan kurikulum Kemenag, Kemendikbud dan Alkhairaat sendiri.

Latar historis sangat mempengaruhi perkembangan pesantren di kabupaten Poso. Maraknya perkembangan pesantren tidak lepas dari semakin menguatnya identitas kelompok Islam dalam pergulatan dominasi dan pengaruhnya. Sebagaimana yang teramati, tokoh-tokoh eks kombatan yang ikut berpartisipasi dalam perang terbuka belakangan tampil dengan pengaruhnya paska konflik. Hal ini tidak lepas dari kontribusi historis dalam perjuangan atas nama iman. Tokoh-tokoh tersebut kemudian memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat Islam sebagai salah satu sosok yang kemudian ditokohkan sebagai kompensasi atas komitmen dan konsistensinya selama masa perang. Legitimasi itu kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pelembagaan di sektor pendidikan. Tujuan pelembagaan itu semula bersifat normatif ke arah pembangunan manusia, rekonstruksi dan pendidikan alternatif non formal bagi anak-anak korban konflik, namun belakangan dipandang memiliki agenda terselebung (*behind motive*).

Agenda terselubung yang dimaksud adalah stigmatisasi yang muncul belakangan setelah mencuatnya isu radikalisme agama diiringi dengan kemunculan MIT sebagai gerakan separatisme bertendensi Islam politik. Pada gilirannya posisi pesantren merupakan bagian yang turut disorot sebagai salah satu produsen yang dianggap turut menyuburkan narasi radikalisme dan gerakan MIT di Poso.

Perkembangan pesantren di Poso jika dilihat dari tinjauan sejarahnya sebetulnya lebih banyak menggmbarakan narasi kontestasi pengaruh dari pergulatan eksistensi antar golongan di internal umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari wajah keberislaman di Poso yang sangat heterogen. Munculnya berbagai varian kelompok Islam termasuk dalam hal ini adalah arus mainstream Muhammadiyah, Alkhairaat dan NU, menjadi bagian dari dinamika kontestasi antar golongan Islam tersebut. Perkembangan ormas-ormas Islam, Orsospol Islam, OKP Islam hingga kelompok-kelompok majelis zikir menjadi penanda menguatnya eksistensi Islam dalam neraca sosiologisnya. Ironisnya realitas tersebut tidak berbanding lurus dalam neraca politisnya.

Dalam dominasi dan pengaruhnya, kelompok Islam semakin menguat tidak saja disebabkan oleh maraknya perkembangan varian-varian Islam, tapi menguatnya pengaruh kelompok Islam, seiring dengan terbelahnya Poso dalam dua arus utama antara Islam dengan Kristen yang dibatasi oleh sekat wilayah. Mayoritas umat Islam umumnya mendiami Poso Kota dan sebagian lagi mendiami Poso pesisir utara dan selatan. Adapun mayoritas Kristen secara keseluruhan mendiami daerah dataran tinggi dan perbukitan. Diliht dari *frame* politik kelompok Kristen cenderung lebih solid dan mendominasi. Kelompok Kristen mampu mengantarkan wakil-wakilnya ke kursi Bupati dan DPRD, hal ini tidak lepas dari kesadaran dan soliditasnya di tengah realitas semakin terkikisnya dominasi Kristen oleh gelombang islamisasi dan menguatnya identitas gerakan Islam paska konflik.

Perkembangan pesantren di Poso dalam analisis peneliti, pada dasarnya lebih terlihat sebagai agregasi konstruksi kelompok-kelompok sosial baru yang lahir sebagai respon atas keterbukaan pasca runtuhnya orde baru. Orde sosial politik yang terjadi di Poso juga memungkinkan terciptanya kenyataan tersebut di mana basis-basis perlawanan umat Islam di masa lalu menjadi perhatian yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan kelompok di luar Islam.

Membatasi perkembangan pesantren sama halnya dengan membuka kran konflik baru. Tidak hanya itu, masyarakat muslim sejatinya belum sembuh dari trauma sejarah. Tidak saja diingatkan pada tragedi konflik di masa lalu, kelompok masyarakat eks korban konflik juga harus menghadapi kenyataan pahit tentang keadilan hukum yang berpangku tangan terhadap pelaku-pelaku pembantaian umat Islam. Kekecewaan demi kekecewaan mengakumulasi lahirnya ideologi perlawanan sebagai jalan alternatif menuntut kepastian hukum atas terbunuhnya nyawa-nyawa yang tidak ada sangkut pautnya dengan konflik bersentimen agama tersebut.

Tragedi Pesantren Walisongo Poso dan Kemunculan MIT

Polarisasi konflik bersentimen agama yang terjadi di masa lalu, setidaknya pernah mencatatkan pembantaian sadis yang dialami lembaga pesantren. Pesantren tersebut adalah Walisongo Poso pada 28 Mei 2000 oleh milisi Kristen. 165 orang santri dan ustad gugur dalam pembantaian tersebut. Menurut sumber lain berjumlah 191 orang. Pembantaian ini dalam laporan-laporan konflik dan intelegen seringkali disebut “Pembantaian Kilo Sembilan, Pembantaian Pesantren Walisongo, dan Pembantaian Sintuwulemba”, sesuai dengan lokasi terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut. Konflik bersentimen agama itu jika dilihat dari *frame* komunikasi politik sesungguhnya hanya sebagai latar depan (*front stage*) mengiringi jalannya kontestasi politik elite lokal (Hasrullah, 2011). Konflik yang terjadi merupakan titik didih dari perseteruan antar elit kepentingan memperebutkan lahan ekonomi dan politik kekuasaan, baik dalam simpul-simpul kekuasaan maupun ekonomi yang terbatas. Periode konflik ini merupakan yang terburuk dari konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Frekwensi konflik itu tetap langgeng hingga saat ini.

Perjalanan konflik dan trauma historis yang berkepanjangan tersebut tidak saja terlihat sebagai sebuah fenomena konflik laten akan tetapi berevolusi dalam polarisasi konflik baru dengan munculnya kelompok kombatan separatis Poso yang belakangan disebut dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tampil sebagai *counter* pemerintah. Kelompok ini kemudian bergerak mengusung ide khilafah dan pembentukan kembali syariat Islam. Keberadaannya tidak saja membebani psikologi negara maupun pemerintah lokal akan tetapi sekaligus membebani psikologi umat Islam karena dipandang sebagai gerakan yang tumbuh dari dendam historis pembantaian umat Islam di masa lalu khususnya yang terjadi di pesantren Walisongo Poso tahun 2000 silam. Kelompok ini terdiri dari eks kombatan konflik Poso dan sebagiannya adalah pemuda-pemuda yang keluarganya turut menjadi korban dalam pembantaian yang dilakukan milisi Kristen.

Pada sisi yang lain, rekonsiliasi Malino yang diinisiasi Jusuf Kalla sebagai langkah yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk perdamaian Poso faktanya belum final hingga saat ini. Rekonsiliasi kerap kali dipandang sebagai sarana impunitas bagi pembantai pada kedua belah pihak yang bertikai di masa lalu. Kenyataan ini menaruh kekecewaan besar terhadap kelompok masyarakat eks korban pembantaian. Rekonsiliasi Malino juga dianggap tidak merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok Islam yang pernah berjuang. Artinya rekonsiliasi Malino hanya dilakukan oleh kelompok yang sebetulnya tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran terbuka di lapangan (McRae & Haripin, 2016). Kebetulan saja orang-orang tersebut ditokoh-tokohkan tanpa jelas siapa kelompok yang menokohkan kemudian dijadikan sebagai wakil aspirasi dalam menyuarakan perdamaian Poso. Di sini sesungguhnya suara perdamaian itu sebetulnya perlu melibatkan seluruh elemen kombatan yang terlibat dalam perang terbuka sehingga bisa menuntaskan narasi panjang konflik yang bertransformasi menjadi tindakan separatisme bahkan terorisme.

Salah satu aktor utama dalam konflik sipil-militer yang terjadi paska reformasi adalah mendiang Santoso alias Abu Wardah. Santoso merupakan keterangan masyarakat yang peneliti kunjungi disebut sebagai salah satu eks korban pembantaian pesantren Walisongo, namun tidak secara langsung dirinya menjadi korban melainkan keluarganya lah yang pada saat itu banyak mengalami pembantaian. Tercatat belasan keluarganya adalah pelajar di pesantren tersebut yang dibantai pada malam hari ketika jam istirahat malam. Tragedi ini jelas membekas dalam ingatan Santoso tidak saja sebagai sebuah kenyataan pahit tapi sekaligus sebagai kenyataan tentang gagalnya peran pemerintah daerah meredam gejolak potensi konflik terbuka antar kedua arus kelompok besar tersebut.

Berdasarkan wawancara Harun Nyak Itam Abu, Pendiri TPM Poso sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Tulisan asli berjudul: "*Ngobrol Imajiner dengan Santoso*", dimuat di Radar Sulteng pada Kamis, (21 April 2016). Secara tegas Santoso selaku Amir MIT pada saat itu, menyatakan hilangnya keadilan di negeri ini. Sebagai korban konflik horizontal Poso pada Mei-Juni 2000 lampau, bertahun-tahun Santoso menunggu datangnya keadilan namun sayang keadilan itu tak pernah terwujud. Pelaku pembunuhan terhadap belasan

anggota keluarganya di Sintuwu Lemba (dikenal di Desa Kilo Sembilan) seolah tak dapat dijangkau oleh hukum hingga hari ini. Demikian pula pembantaian di Buyung Katedo (2 Juli 2001) dan beberapa tempat lain di Poso, hingga kini tetap berleumpang kangkung karena bisa mengangkangi hukum. Deklarasi Malino juga ditafsirkan keliru oleh berbagai pihak sehingga dijadikan sebagai sarana impunitas bagi pelaku kejahatan, padahal Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kekecewaan demi kekecewaan itu bertumpuk menjadi kesumat dan pada akhirnya Santoso memilih jalan lain untuk mewujudkan keadilan itu.

Ditambah lagi dengan kenyataan pahit mengenai rekonsiliasi yang kerap dianggap sebagai jalan tembus lepas dari jeratan hukum. Fakta ini tidak saja dianggap sebagai sebuah kegagalan pemerintah daerah atas kekejaman konflik tapi sekaligus sebagai kegagalan sebuah sistem pemerintahan yang dipandang sebagai sistem *thogut*. Kekecewaan dan kekesalan itu mengagregasi dan memobilisasi lahirnya kelompok separatis MIT dan kombatan Poso yang dibangun di atas landasan teologi perlawanan yang kental dengan narasi-narasi Islam. Kelompok ini oleh BNPT dilaporkan termasuk dalam sel-sel terorisme bertaraf transnasional. Itu artinya MIT tidak saja sebagai gerakan sipil bersenjata yang bersifat lokal akan tetapi memiliki akses jaringan dan dukungan dari organisasi terorisme global.(Mbai, 2014)

Latar belakang kemunculan MIT sendiri dari beberapa sumber wawancara dengan tokoh masyarakat di sana menyebutkan banyak dipengaruhi oleh teologi Tauhid wal Jihad, sebuah ideologi jihad yang muncul di Irak pada 2001, yaitu Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Musab al-Zarqawi, dan Abu Bakr al-Baghdadi masuk ke Indonesia pada 2001. Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa kemunculan MIT banyak diilhami dari gerakan jihad global Al-Qaeda yang dibentuk oleh Osamah bin Laden. Namun pandangan BNPT cenderung melihat MIT sebagai sel-sel jihad global yang bertumpu pada satu ambisi politik yang sama yaitu penegakkan *khilāfah*. Paling tidak keberadaan MIT dapat dilihat sebagai kesamaan motif dengan kelompok-kelompok jihadis di berbagai belahan dunia tentang sebuah cita-cita yang dikehendaki pada umumnya. (Mbai, 2014)

Keberadaan MIT di Poso setidaknya menjadi sebab terbelahnya orientasi umat Islam di sana. Ada yang mendukung dan berempati terhadap kelompok ini, namun kebanyakan menolak adanya gerakan tersebut, karena dianggap tidak saja membebani psikologi elemen sosial yang ada akan tetapi sekaligus sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Bahkan dampaknya terasa hingga ke lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren.

Secara karakteristik gerakan radikalisme MIT setidaknya terpotret dalam dua bentuk yaitu: a) bersifat transnasional, yang basis pengaruhnya sesungguhnya berasal dari Timur Tengah. Berkembang pesat di awal era reformasi (sekitar tahun 1997 dan 1998), dengan nama yang beragam. Sampai sekarang menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif, b) sasaran utamanya adalah generasi muda melalui kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, dan rumah

ibadah (masjid, surau, dan musholla). Bentuk kegiatannya antara lain: taklim (rutin), pesan youtube, serta kampanye beraroma provokatif.

Keberadaan MIT yang dianggap sebagai ekspresi perjuangan umat Islam melawan ketidakadilan memberi dampak stigmatisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana. Pada sisi yang lain keberadaannya juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang membatasi perkembangan institusi-institusi Islam di tengah realitas semakin menguatnya identitas Islam Poso. Dilihat dari eksistensinya, MIT di satu sisi membebani psikologi umat Islam namun disisi yang lain justru berdampak positif terhadap perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di Poso. Tampak dari semakin maraknya perkembangan pesantren paska konflik.

Hanya saja yang tetap harus diperhatikan adalah bahwa perkembangan gerakan kombatan ini tidak bisa didiamkan begitu saja oleh negara yang cenderung melihat kemungkinan-kemungkinan yang memicu munculnya separatisme dan pembangkangan publik di masa depan. Sedini mungkin perlu dilakukan upaya preventif sebagai respon bagi kemungkinan berkembangnya separatisme, upaya represif sebagai respon dari eksistensi dan perkembangannya, dan upaya rehabilitasi sebagai tindak lanjut untuk melakukan deradikalisasi atau de-separatisme. Dalam upayanya, negara beserta unsur-unsurnya meliputi BIN, BNPT, TNI dan Polri, terkesan pukul rata dalam melakukan usaha preventif dan represif tersebut.

Menakar Potensi Radikalisme di Pesantren

Pesantren kerap kali dipandang sebagai kemungkinan terbesar berkembangnya potensi separatisme dan radikalisme (Ridlwan, 2019). Bahkan pesantren seringkali dikait-kaitkan memiliki hubungan dengan gerakan kombatan MIT. Pandangan ini bisa dibenarkan mengingat keberadaan beberapa pesantren di Poso didirikan paska pembantaian dan pembakaran pesantren Walisongo Poso. Dalam hal ini adalah pesantren Amanah Poso sebagai salah satu sasaran dalam penelitian ini, yang didirikan atas inisiasi tokoh-tokoh eks kombatan Poso untuk menampung pelajar-pelajar muslim yang kehilangan sanak famili akibat tragedi pembantaian di kampung-kampung muslim. Pendiannya juga sekaligus sebagai tempat rehabilitasi psikologi paska konflik. Selain itu pendiriannya juga dimaksudkan untuk menampung eks santri Walisongo yang mengungsi setelah pesantrennya dibakar.

Kecurigaan dari pandangan negara bukan tanpa alasan, menguatnya perkembangan pesantren dan semakin massifnya gerakan kelompok kombatan MIT seringkali dihubung-hubungkan dengan proses pendidikan di pesantren. Keberadaan kombatan MIT dicurigai merupakan alumni-alumni pendidikan pesantren sehingga atas wacana tersebut pesantren kerap dituduh sebagai produsen bagi agen-agen radikal. Tidak sedikit pesantren yang dituduhkan mengajarkan teologi perlawanan. Kurikulum dan sistem pembelajaran di pesantren kerap dianggap berpotensi mengajarkan paham radikal (Kusmanto et al., 2015). Dari

beberapa pesantren yang terdapat di Poso, setidaknya ada dua pesantren yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yang kerap dituduh memiliki bahkan mengajarkan paham radikal. Kedua pesantren itu adalah pesantren Walisongo Poso dan Amanah Poso.

Klaim di atas tersebut tidak sepenuhnya benar tetapi tidak sepenuhnya juga salah, banyak juga lembaga-lembaga pesantren yang ditengarai mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi para mujahid dalam pengertian membenarkan tindakan kekerasan untuk kepentingan politiknya atas nama Islam, pendidikannya pun dikemas secara ekstrim (Farida, 2015). Bahkan sejumlah Yayasan dari Saudi Arabia, telah mendanai lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai Negara mulai dari New York, AS, hingga Nigeria untuk mendorong tindakan-tindakan intoleran dan bersikap ekstrem. Di lembaga-lembaga pendidikan inilah kelompok itu melakukan berbagai pelatihan, mulai dari pencucian otak (*brain wash*), doktrin ideologis hingga latihan militer untuk perang di beberapa Negara seperti Afghanistan, Kashmir, Cechnya, dan sebagainya (Fanani & Mahromi, 2009). Hal ini juga berhubungan erat dengan terosime global yang dilakukan Al_Qaedah memiliki hubungan erat dengan pendanaan yang dilakukan oleh Saudi Arabia pada kelompok tersebut, hal ini menjadi terang mengingat hubungan Usamah bin Laden dengan Arab Saudi sebagai salah satu orang yang memiliki pendanaan besar terhadap gerakan tersebut (Hasan, 2006).

Untuk konteks Poso sendiri setidaknya dari uraian analisis yang peneliti peroleh menunjukkan adanya pola rekrutmen calon jihadis baru melalui pendekatan ta'lim klandestin yang dilakukan secara tertutup dan menjangkau kalangan tertentu. Biasanya pemuda-pemuda yang kurang terdidik dan kurang mengerti tentang nilai-nilai Islam yang sejatinya dibangun di atas semangat universalisme. Selanjutnya mereka yang sudah menjadi calon jihadis kemudian mendapatkan materi tentang pentingnya jihad dan semangat mati syahid (*isytiyhadiyah*). Barulah setelah diberi pelatihan kemiliteran yang dilakukan di sepanjang kaki gunung Poso. Untuk gambaran spesifiknya seperti senjata dan logistik tempur peneliti tidak memperoleh informasi sedikit pun mengenai hal tersebut. Akan tetapi pendapat dan keyakinan peneliti sangat mengarah pada distribusi senjata serta logistik tempur yang diselundupkan melalui jalur laut di teluk Tomini oleh pihak tertentu yang tidak terkonfirmasi.

Mengenai relasi \pesantren dengan MIT, maupun dugaan yang menjustifikasi pada sebuah pemahaman bahwa pesantren sebagai pabrikasi radikalisme-terorisme, dalam observasi dan investigasi yang peneliti lakukan sebetulnya adalah sebuah pandangan yang salah besar. Sangat sukar untuk dapat membuktikan kebenaran tentang dugaan demikian. Meskipun MIT selalu tampil dengan atribut dan simbol-simbol agama Islam yang juga cenderung dipakai dalam komunitas pesantren seperti jenggot, cingkrang, sorban, gamis dan diksi-diksi yang bersumber dari rujukan teks Al-Qur'an maupun Hadist, namun potret demikian tidak bisa dipakai sebagai ukuran untuk membenarkan dugaan demikian.

Adanya kemungkinan munculnya radikalisme Islam komunitas pesantren bukan suatu hal yang mustahil. Namun demikian, penting dicatat bahwa tingkat kemungkinan munculnya gerakan radikalisme Islam dari lingkungan pesantren tidak dapat dipukul rata (arbitrer), terutama karena dunia pesantren sangatlah heterogen menyangkut tradisi, corak, karakteristik dan tipologi. Secara sederhana tingkat kemungkinan tersebut dapat dikategorikan dengan kemungkinan tinggi dan kemungkinan rendah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kemungkinan tersebut tidak bisa dipukul rata, *pertama*, latar belakang pengetahuan agama dan faham keagamaan para pimpinan pesantren antar pesantren satu dengan yang lain berbeda-beda. Lagi pula karakter asli pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan, sangat menekan dimensi skolastisitas yang sangat berpihak pada paham keagamaan Sunni yang sangat mengedepankan perilaku *i'tidāl, tasāmuh, ta'āruf, tawāzun* dan *tawassuth* sekaligus pada saat yang sama sangat jauh dari paham keagamaan ekstrem. Mayoritas pesantren tradisional di Indonesia sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip ke-Sunni-an tersebut, kecuali beberapa pesantren yang memang memiliki kekhasan tertentu sebagai akibat persinggungan pengasuhnya dengan beberapa faktor eksternal. Dalam konteks ini, sebutan pesantren untuk lembaga pendidikan yang ahistoris dan tidak mencerminkan karakter dasar tradisi Sunni tersebut merupakan sesuatu yang salah kaprah. Pesantren, sesuai dengan namanya yang berasal dari kata satri senantiasa mengedepankan sisi-sisi perilaku yang jauh dari ekstremitas dan radikalisme. *Kedua*, sistem pendidikan, termasuk kualitas tenaga pengajar, bahan ajar, kurikulum tersembunyi dan literatur pesantren antar satu dengan yang lain berbeda-beda. *Ketiga*, lingkungan sosial pesantren, termasuk jaringan sosial dan politik unsur pesantren (pimpinan, ustadz dan santri) berbeda-beda. *Keempat*, pengalaman perjuangan kehidupan sosial dan politik pimpinan pesantren.

Akan tetapi juga penting digarisbawahi, bahwa kemungkinan munculnya radikalisme Islam pada lingkungan pendidikan pesantren tidaklah semata-mata karena beberapa faktor di atas, tetapi masih banyak faktor eksternal lain yang ikut mempengaruhi, seperti faktor ideologi politik, dan sosial budaya, solidaritas kelompok, dan doktrin teologis.

Proses investigasi dan inspeksi negara melalui unsur-unsurnya seperti BNPT, BIN, BAIS dan INTELKAM kerap terlalu dini mewacanakan dugaan-dugaan yang menjurus pada tuduhan-tuduhan yang sulit dibuktikan. Beberapa pesantren yang ada di Poso sebagaimana telah disebutkan di awal nyaris selalu menjadi objek investigasi dan inspeksi oleh negara. Kedua pesantren tersebut pada dasarnya memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing dalam mengawali debutnya di kancah pendidikan nasional. Kedua pesantren tersebut juga memiliki corak, karakteristik, dan tipologi serta bangunan orientasi pendidikan yang berbeda-beda. Dari segi corak ada yang bersifat *salaf* ada pula yang bersifat *khalaf*. Dari segi fasilitasnya ada yang tradisional adapula yang moderen. Dari segi manhaj ada yang

bermanhaj pada salafussalih, ahlussunnah hingga yang terindikasi berafiliasi dengan manhaj wahabi jihadis.

Pesantren-pesantren tersebut jika ditelusuri dari hasil observasi dan wawancara yang berkembang di kalangan intelejen sulit untuk membuktikan keterlibatannya dengan radikalisme maupun MIT. Seperti pesantren Amanah Poso yang sebetulnya menyangsikan kerja-kerja intelijen di Poso yang terlalu menaruh kecurigaan pada pesantren yang sebetulnya masih jauh dari kata mapan, sehingga sangat tidak mungkin untuk melakukan mobilisasi perlawanan dan pelatihan militer. Adapun pesantren Walisongo juga dalam proses rehabilitasi dan pemulihannya bahkan mendapat penjagaan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri, tujuannya tidak saja sebagai upaya proteksi melainkan juga sebagai investigasi dan inspeksi berkelanjutan. Mengawasi adanya perkembangan gerakan-gerakan tambahan yang mencurigakan. Maka dari itu sangat tidak mungkin juga untuk melakukan hal-hal yang berbau separatisme dan terorisme.

Kecurigaan negara yang dialamatkan pada pesantren sebetulnya dilandasi oleh aspek-aspek fundamen meliputi latar belakang sejarah pendiriannya, nilai-nilai yang berkembang di dalamnya, lokasinya di tengah situasi konflik, relasinya dengan kelompok kombatan, penerapan kurikulumnya, latar belakang santri-santrinya, kitab-kitab yang diajarkan, hingga ustad-ustad sebagai tenaga pengajarnya. Hal tersebut menjadi dasar bagi negara untuk mengidentifikasi pesantren-pesantren yang dicurigai tersandung kasus radikalisme. Meski dalam kenyataannya sukar untuk dibuktikan, akan tetapi wacana radikalisme sudah terlanjur berkembang dan melekat di benak publik sebagai sarang radikalisme. Sebuah fenomena yang tidak saja melukai kalangan pesantren tetapi sekaligus kalangan umat Islam di tanah air. Pesantren sebagai lembaga yang terdepan mengkampanyekan ajaran Islam pada dasarnya memiliki sumbangsih besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Keberadaannya juga sekaligus menunjukkan otentisitas wajah pendidikan nusantara yang pada dasarnya dibangun di atas semangat inklusivisme, progresivisme dan kosmopolitanisme.

Dalam perkembangannya, wacana radikalisme di pesantren terkadang menjadikan aspek kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai faktor determinan dalam upaya indoktrinasi nilai-nilai radikal kepada santri. Sebab itu investigasi dan inspeksi sekali waktu ditindaklanjuti dengan kegiatan *sweeping* kita-kitab yang mengandung ajaran-ajaran radikalisme. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengkonfirmasi nyaris buku-buku yang bergenre salafi banyak yang ditarik oleh aparat, ditemukan di rumah-rumah warga pada komunitas Islam yang memang cenderung bersimpati dengan MIT. Akan tetapi buku-buku demikian tidak ditemukan di pesantren yang ada di Poso. Ini sekaligus mengkonfirmasi pula bahwa pesantren sejauh pengamatan peneliti tidak sama sekali berurusan dengan radikalisme apalagi dengan MIT.

Dalam proses *sweeping* tersebut memang tidak sedikit ditemukan buku-buku yang beredar mengandung ajaran-ajaran teologi perlawanan seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, kitab-kitab bergenre mazhab politik wahabi hingga

buku-buku karya mujahid yang ditulis dipenjara seperti buku hasil tulisan Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazera, 2004) dan Abu Umar Ba'asyir, *Teroris Melawan Teroris*, (terbitan Mawazin tanpa tempat dan tahun terbit). Kedua buku karya mujahid ini dihadiahkan kepada peneliti saat melakukan mini riset.

Secara garis besar kedua isi buku ini membincangkan tentang kewajiban berjihad membela ajaran Islam, kebolehan melakukan bom bunuh diri, sistem demokrasi sebagai sistem *thogut* hingga kewajiban mendirikan khilafah Islam sebagai antitesis demokrasi sekaligus proyek besar dalam pemikiran tersebut. Bahkan dalam penjelasan-penjelasanannya sering diselipkan ayat-ayat maupun hadits sebagai basis legitimasi yang mendasari pikiran-pikiran yang dituangkan dalam tulisan-tulisan tersebut. Dilihat dari animo masyarakat secara behavioral umumnya merespon dengan antusias pikiran-pikiran tersebut. Asumsi ini beralasan mengingat perkembangan gerakan separatisme dan radikalisme kombatan Poso mendapat sebagian kecil dukungan masyarakat muslim Poso. Fakta itu terjawab dengan antusiasme sebagian muslim Poso mengantarkan jasad mendiang Santoso ke pemakaman. Pekikan takbir dan tahlil bergemuruh memecah tangis dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jasad Santoso diperlakukan bak mujahid yang memperjuangkan Islam. Setelah kematiannya kelompok kombatan Poso tetap eksis di bawah pimpinan baru Ali Kalora, bahkan dukungan masyarakat semakin menguat paska Santoso.

Akan tetapi, tidak berarti bahwa masyarakat Islam Poso sepenuhnya merupakan simpatisan MIT. Perlu untuk ditegaskan pula dalam analisis ini adalah posisi umat Islam yang sebetulnya terbelah dalam dua arus utama antara kelompok ekstrimis radikal yang berafiliasi dengan MIT dan kelompok reformis-moderat yang berafiliasi dengan ormas-ormas mainstream seperti Muhammadiyah, Alkhairaat dan NU. Dari pembelahan ini juga tampak jelas terlihat penggolongan sosial kedua kelompok Islam yang terbelah memiliki basis orientasi yang menjadi anutannya.

Dalam orde sosial tertentu, di tengah maraknya wacana yang mengkait-kaitkan antara pesantren dengan radikalisme, nyatanya tidak membuat pesantren di Poso ditinggalkan masyarakat muslim. Wacana radikalisme di pesantren tidak menjadi hambatan bagi perkembangan pesantren. Ini ditunjukkan dengan populasi santri dari ketiga pesantren yang cenderung stabil bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Pesantren-pesantren tersebut pada dasarnya juga memiliki motivasi yang tidak selalu harus bersanding dengan radikalisme sebagai isu yang sering dituduhkan kepada pesantren. Radikalisme sebagai sebuah problem sosial sebetulnya tidak hanya tumbuh dari ikatan sosial pendidikan yang ditempuh dan tumbuh di institusi pendidikan Islam semata, melainkan bisa tumbuh dari interaksi sosial maupun dari lingkungan pergaulan sosial yang hadir dalam piranti-piranti pemikiran yang radikal bahkan dari berbagai ideologi seperti komunisme, nazisme, shi'isme hingga wahabisme yang kenyataannya juga adalah ideologi atau paham politik yang menghalalkan kekerasan. Olehnya keberadaan lembaga pesantren dalam suatu entitas masyarakat perlu dijaga reputasinya sebagai otentisitas wajah asli pendidikan di tanah air yang welas asih dan tenggang rasa.

Sebetulnya tuduhan tentang pesantren sebagai pabrikasi radikalisme-terorisme berpangkal dari pemberitaan media-media arus utama. Di mana praktik jurnalisme terkesan dipolitisir untuk sengaja menkonstruksi pesantren sebagai sasaran stigma tersebut. Media menjadi domain yang terlanjur berselingkuh dengan elite kekuasaan untuk menampilkan realitas semu tentang citra pesantren. Setidaknya terdapat tiga aspek yang bisa menjadi basis eksplanasi penting mengenai praktik sesat jurnalisme tersebut: 1) teks berita yang dikonstruksikan mencerminkan dominasi elit dalam mewacanakan isu terorisme dan radikalisme terhadap pondok pesantren; 2) produksi dan konsumsi teks berita berdasarkan kebijakan redaksi media yang berorientasi kepada kepentingan pasar sehingga realitas isunya menjadi kabur (semu). 3) konstruksi realitas isu terorisme dan radikalisme terhadap pondok pesantren diwarnai kepentingan ideologi media, politik media, ekonomi media, dan budaya media (Wazis et al., 2020).

Terhadap realitas semu ini, saran peneliti sebaiknya pesantren di Poso perlu menggalakkan literasi media melalui jurnalisme pesantren. Produk jurnalisme pesantren menjadi instrumen perlawanan terhadap isu miring yang menampilkan pesantren sebagai sasaran stigma di *counter* dengan berita bahwa lembaga pendidikan Islam pesantren merupakan tempat perkecambahan nilai-nilai rahmatan lil alami, radikalisme, terorisme maupun separatisme.

Sebagian besar kalangan yang menolak pemberitaan itu menilai bahwa radikalisme agama muncul di Indonesia pasca kemerdekaan, ditandai dengan munculnya gerakan DI/TII, sebuah gerakan politik yang mengatasnamakan agama, justifikasi sepihak, taklid buta dan sebagainya. Tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan pesantren yang telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa pesantren yang dicurigai terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme global, tapi bukan berarti dengan demikian mendiskreditkan seluruh pesantren.

Lebih kerucut, wacana radikalisme pesantren massif menjadi perbincangan masyarakat pada titik dimana maraknya perkembangan radikalisme hingga terorisme. Dalam hal ini adalah Poso sebagai salah satu dari beberapa titik massifnya perkembangan radikalisme di Indonesia bersama dengan Solo, Makassar, Ambon, hingga NTT. Radikalisme di Poso berkembang ketika meletusnya tragedi perang antar agama Islam dan Kristen yang terjadi bersamaan dengan transisi kekuasaan orde baru menuju orde reformasi.

Jauh sebelum kemunculan kelompok MIT, Laskar Jihad dibawah kepemimpinan Ja'far Umar Thalib, telah lebih dulu menjadi wadah perlawanan umat Islam terhadap umat Kristiani ketika meletusnya konflik Poso. Kemunculan MIT sebetulnya dimulai paska rekonsiliasi Malino yang meninggalkan ketidakpuasan di pihak umat Islam. Penegakkan hukum yang dianggap tidak adil menjadi salah satu alasan mencuatnya gerakan separatisme MIT yang santer beberapa tahun lalu termuat di Youtube.

Bertolak dari keterkaitan hubungan pesantren di Poso dengan radikalisme terlihat secara jelas bahwa faktor dominannya tidak terletak pada tinggi-rendahnya pengetahuan agama. Oleh karena itu, radikalisme bisa dimiliki oleh orang yang memiliki pengetahuan agama cukup luas, atau sebaliknya bisa juga menular kepada seseorang yang berpengetahuan agama terbatas. Faktor penentunya adalah corak ajaran agama yang diterima seseorang, penempatan agama dalam konteks pribadi dan sosial, serta pemanfaatan agama pada saat dibawa ke ranah perjuangan untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Pada akhirnya gerakan tersebut cenderung mengarah pada kepentingan secara politik. Olehnya dari konteks di atas penelitian sangat jelas bahwa pelaku radikalisme di Poso yang diusung MIT tidak berasal dari ikatan intelektualisme bentukan pesantren di sana, demikian pula pesantren tidak memiliki indikasi apapun dengan radikalisme apalagi terorisme sebagaimana yang kerab dituduhkan oleh pihak tertentu khususnya pemberitaan media yang terkesan *by order*.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pesantren yang terjadi di Poso dimulai paska konflik iman (1998-2001) di mana salah satu insiden dalam konflik tersebut adalah pembantaian yang terjadi di pesantren Walisongo Poso di Kilo Sembilan. Pembantaian ini menjadi salah satu tragedi paling berdarah yang memicu rentetan pertempuran dari pihak Islam hingga memicu munculnya MIT sebagai kumpulan individu yang merasa tidak puas dengan rekonsiliasi. Salah satu tokoh penting dari MIT adalah Santoso.

Radikalisme yang berkembang di Poso tidak beriringan dengan motivasi perkembangan pesantren. Radikalisme merupakan fenomena tersendiri yang memiliki argumentasi yang murni terpisah dengan fenomena pesatnya perkembangan pesantren. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa pesantren yang berkembang di Poso tidak memiliki ikatana intelektualisme apapun dengan kelompok MIT.

MIT murni merupakan kelompok kombatan yang tumbuh dari ikatan sosial di luar pendidikan Islam pesantren, adapun aktor-aktor kombatan MIT dalam investigasi yang peneliti lakukan tidak berasal dari lingkungan pendidikan pesantren di Poso, lagipula pesantren di Poso merupakan tipologi pesantren tradisional yang masih dikatakan sangat belia dan belum mapan serta belum memiliki jaringan kaderisasi yang luas, sehingga sangat mustahil untuk dapat menjadi pabrikasi kombatan Poso.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang pertama peneliti sampaikan kepada kedua orang tua peneliti yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan peneliti, selanjutnya kepada para guru, dosen, asatidz, masyaikh, teristimewa kepada kedua promotor peneliti yang telah mendorong peneliti dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian naskah penelitian yang telah diperas menjadi jurnal. Tidak lupa

peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para informan yang tidak ingin disebut namanya karena privasi dan alasan keamanan. Kepada pihak-pihak yang tidak sempat disebut di sini peneliti juga berterima kasih atas semua bantuan, dorongan dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2004). Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer. *Jurnal Dinika*, 3(1).
- BNPT: 19 Pesantren Terindikasi Ajarkan Radikalisme. (t.t.). Diambil 22 November 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160203201841-20-108711/bnpt-19-pesantren-terindikasi-ajarkan-radikalisme>
- Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*. (2011). Gramedia Pustaka Utama.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.
- Fanani, A. F., & Mahromi, A. (2009). *Ijtihad Pesantren tentang Toleransi dan Good Governance*. Canadian International Development Agency.
- Farida, U. (2015). Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).
- Fitriani, L. (2015). Pendidikan Peace Building Di Pesantren: Sebuah Upaya Mencegah Radikalisasi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 117. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3011>
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Karnavian, T. (2008). *Indonesia Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmanto, T. Y., Fauzi, M., & Jamil, M. M. (2015). Dialektika radikalisme dan anti radikalisme di pesantren. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 27–50.
- Laisa, E. (2014). ISLAM DAN RADIKALISME. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Madjid, A. (2010). *Memahami Agama Damai Dunia Pesantren*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Kementerian Agama RI.
- Mbai, A. (2014). *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. AS Production Indonesia.
- McRae, D., & Haripin, M. (2016). *Poso: Sejarah komprehensif kekerasan antar agama terpanjang di Indonesia pasca reformasi*. CV. Marjin Kiri.

- Nasution, H. (1985). *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. UI Press.
- Nuh, N. M. (ed.). (2010). *Peranan Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id*. (t.t.). Diambil 22 November 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160203201841-20-108711/bnpt-19-pesantren-terindikasi-ajarkan-radikalisme>
- Ridlwani, M. (2019). Dialektika Pesantren Dan Radikalisme Di Pesisir Utara Lamongan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 36. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.448>
- Susanto, E. (2007). Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di “Pondok Pesantren.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Wazis, K., Hidayat, D. R., & Wahyudin, U. (2020). Konstruksi realitas semu mengenai isu terorisme-radikalisme terhadap pondok pesantren. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.25461>
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. P3M.